



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 001/05012009
HARI : SENIN
TANGGAL : 5 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	RI Diminta Desak PBB Agar Gunakan Veto	3
	Maliki, "Irak tidak ingin dimanfaatkan"	3
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Government preparing Rp 50 trillion to stimulate growth	4
	Lembaga Survei Indonesia: "SBY Capres Terkuat"	5
	B. EKONOMI	
	Infrastructure projects key to safeguarding economy	6
	C. SOSBUD	
	Gempa di Manokwari	7
	TNI AL Siagakan Kapal RS untuk Manokwari	8
	D. HANKAM	
	TNI Awasi Ketat Dua Pulau di Bengkulu	9
	E. HUKUM	
	Kejaksaan diklaim memiliki 52 rekening liar	10

	F.	OLAHRAGA	
	1	The Reds Puji Merah Putih	10
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
	III.	ARTIKEL	
		Analisis Ekonomi-Meredam Dampak Krisis dari Daerah	11
		Mumpung Masih Tahun Baru	13
	IV.	LAIN-LAIN	
	V.	EDITORIAL	
		Where will the poor go this year?	15

Jakarta, 5 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. RI Diminta Desak PBB Agar Gunakan Veto

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak pemerintah Indonesia agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan hak vetonya guna menghentikan agresi militer Israel ke Jalur Gaza. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta pemerintah Indonesia memprakarsai resolusi sanksi atas Israel melalui Dewan Keamanan PBB. Muhammadiyah menilai selama ini hak veto yang dimiliki PBB tidak digunakan sebagaimana mestinya. "Pangkal masalah agresi militer ini karena negara yang memiliki hak veto tidak bersikap adil dan berbuat tegas terhadap Israel," kata Din yang dibacakan oleh Ketua PP Muhammadiyah Hayder Nashir dalam konferensi pers di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, hari ini. Menurut Hayder bila hak veto tegas dilakukan, maka agresi militer Israel ke jalur Gaza bisa terselesaikan.

Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini juga meminta agar PBB memberi sanksi berat terhadap Israel sebagai pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan. Ketua PP Muhammadiyah yang lainnya, Yunahar Ilyas menambahkan, PP Muhammadiyah juga akan menggalang kekuatan negara-negara Islam seperti Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI), agar menyatukan diri dan mengambil kebijakan tegas dan signifikan dalam menyikapi Israel dan membela rakyat Palestina. Ilyas mengimbau negara Arab yang memiliki kekayaan minyak dan memiliki kekuatan ekonomi menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel agar mereka memutuskan hubungan diplomatik. "Putuskan hubungan diplomatik dan transaksi ekonomi jika negara itu bila tetap menjalin hubungan dengan Israel," kata Ilyas.

Ketika ditanya soal desakan Muhammadiyah agar pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan militer ke Palestina, Hayder tidak tegas menjawab. "Persoalannya tidak hanya sekedar dengan semangat jihad. Banyak negara yang kapok perang dengan Israel, karena tidak semua negara Timur Tengah mau perang dengan Israel," terang Ilyas. PP Muhammadiyah secara resmi menggalang dukungan dana solidaritas terhadap warga Palestina. Organisasi ini telah mengirimkan sembilan tenaga medis ke jalur Gaza untuk memberikan bantuan terhadap kekerasan dan korban luka parah bagi warga sipil. "Hari ini delapan orang berangkat ke Palestina, yang satu orang (lainnya) sudah berangkat kemarin," kata Hayder.(Tempo)

2. Maliki, "Irak tidak ingin dimanfaatkan"

Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki, yang mulai kunjungan ke Iran, Sabtu, mengatakan kepada televisi resmi Iran bahwa pemerintahnya tidak akan mengizinkan Irak dimanfaatkan sebagai pangkalan untuk mengancam negara-negara tetangganya. Al-Maliki mengatakan kepada saluran berita berbahasa Arab TV Iran itu bahwa Irak "tak akan mengizinkan wilayahnya digunakan sebagai pangkalan peluncur ancaman negara lain," demikian Al-Alam dalam situs internetnya. Mandat pasukan AS di Irak tercatat sampai 1 Januari, satu langkah yang diupayakan Maliki untuk memulihkan kedaulatan negaranya, setelah hampir enam tahun terjadinya serangan yang dipimpin AS untuk menumbangkan Saddam Hussein.

Iran terlibat dalam sengketa sekitar rencana nuklirnya dengan AS, yang memerintahkan aksi militer jika diplomasi yang dilakukannya gagal untuk mengakhiri sengketa tersebut. Washington dan sekutu-sekutunya menuduh Iran berupaya untuk mengembangkan senjata nuklir, dan tuduhan tersebut dibantah oleh Teheran. Sejumlah analis menilai, serangan AS terhadap Iran akan lebih banyak melibatkan serangan udara daripada serbuan darat. Untuk itu, Washington akan menggunakan pangkalannya di wilayah negara yang pernah digunakan untuk menyerang Irak pada 2003. Washington

dan Teheran terlibat saling tuduh-menuduh mengenai siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya aksi kekerasan di Irak.

Pejabat AS mengatakan bahwa Teheran mendukung gerilyawan Irak. Namun Teheran menuding kehadiran pasukan AS yang menjadi penyebab kekacauan di Irak dan mengatakan bahwa mereka harus ditarik mundur dari seluruh wilayah Irak. Baghdad sejak lama menyerukan kedua pihak tidak menggunakan Irak sebagai ajang pertempuran. Maliki juga menekankan bahwa Irak akan membuka semua agenda yang tertunda dengan negara-negara tetangganya, dan negara-negara lain, dalam rangka membangun hubungan baik dengan mereka. Dia menambahkan bahwa Irak akan membangun poros hubungan positif dengan Iran.

Bom Bunuh Diri

Dari Baghdad dilaporkan, seorang pengebom bunuh diri menewaskan 23 orang dan melukai sedikitnya 42 orang pada pertemuan suku di dekat ibukota Irak, Baghdad, akhir pekan lalu. Menurut juru bicara pasukan keamanan Jenderal Qassem Atta, pengebom itu meledakkan rompi bomnya pada pertemuan makan siang para sheikh Arab Sunni di al-Yusufiyah, kota kecil di selatan Baghdad. "Dua puluh tiga orang tewas dan sedikitnya 42 orang terluka," kata Atta. "Pengebom bunuh diri itu adalah anggota suku yang dekat dengan sheikh penting setempat. Dia masuk pertemuan lewat pintu belakang."

Militer AS telah merekrut suku-suku yang berpengaruh di Irak untuk perang melawan al-Qaida dalam beberapa tahun belakangan ini, khususnya di daera-daerah Arab Sunni. Pengeboman itu terjadi setelah AS menyerahkan kendali keamanan Zona Hijau di Baghdad dan fasilitas militer lainnya kepada Irak saat mandat PBB untuk tentara asing habis masa berlakunya. Sebelumnya, tentara AS melepaskan tembakan kepada seorang perempuan produser stasiun televisi Irak di satu pos pemeriksaan Baghdad dan membuat korban menderita luka parah, demikian laporan stasiun televisi lokal dan militer AS, Sabtu.

Satu pernyataan yang dikeluarkan oleh stasiun televisi Biladi melaporkan bahwa Hadeel Imad (25) menderita luka parah ketika tentara AS melepaskan tembakan ke arahnya di satu pos pemeriksaan di permukiman Jadriya di Baghdad selatan. Pernyataan stasiun televisi itu mengutuk keras kejadian tersebut dan menuduh tentara AS bertindak kejam, ketika berurusan dengan nyawa orang Irak. Militer AS menyatakan dalam satu pernyataan bahwa mereka melepaskan tembakan kepada seorang perempuan Irak "setelah perempuan itu bertingkah mencurigakan dan tidak menanggapi peringatan." (Suara Karya)

I I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Government preparing Rp50 trillion to stimulate growth

President Susilo Bambang Yudhoyono has said that the government is allocating Rp50 trillion in stimulus to generate economic growth and anticipate the impact of global economic crisis in 2009. Speaking to a press conference on the sidelines of his visit to Ragunan Zoo here on Sunday, the president said that Rp38 trillion of the stimulus fund came from the 2008 unspent budget and Rp12 trillion from the 2009 state budget's reserved funds. "The Rp38 trillion plus Rp12 trillion from the reserved funds is very useful for stimulating economic growth and overcoming the impact of the world economic crisis," the president said. He said that in anticipation of the global economic crisis which was

expected to peak in 2009, the government was formulating various economic growth stimuli in order to guarantee the development of the real sector.

Previously, the head of state said that the government would always adjust its economic stimulus package to the state's financial capability so that it would not pose a new burden in the future. He said that the 2008 unspent budget of Rp38 trillion which would be used for stimulating economic growth in 2009 was obtained not because of failure to absorb the 2008 budget but because of increase in state revenues. The president said that state revenues in 2008 increased to a level which was 10 percent over the tax payment target. Therefore, the president expressed his satisfaction over the 2008 state budget performance.

Yudhoyono said that about 99.6 percent of the 2008 state budget were spent so that there was a difference of Rp4 trillion between state revenues amounting to Rp981 trillion and expenditures valued at Rp985 trillion. Thus, the 2008 budget deficit became smaller, namely 0.1 percent of the Gross Domestic Product (GDP), than the targeted 2.1 percent of the GDP. The president said that the 2008 state budget performance, as it was reported by the finance minister on January 1, 2009, would be used by the government as an indicator to measure its preparedness to face the 2009 global financial crisis. (Antara News)

2. Lembaga Survei Indonesia: "SBY Capres Terkuat"

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan calon presiden terkuat dengan tingkat keterpilihan tertinggi. Menurut jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI), jika pemilihan presiden diadakan saat ini, SBY mendapat dukungan 43 persen. Megawati Soekarnoputri berada pada posisi kedua dengan dukungan 19 persen. Sedangkan Prabowo Subianto dan Sultan Hamengku Buwono X masing-masing didukung 5 persen, disusul Wiranto 3 persen, Hidayat Nurwahid 2 persen, serta Amien Rais dan Akbar Tanjung masing-masing 1 persen. "SBY merupakan pilihan utama responden. Nama yang disodorkan adalah SBY, Mega, JK, Amin, Hidayat Nurwahid, Wiranto, Prabowo, Sultan dan lain-lainnya. Jumlahnya 20 orang," kata Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani saat menyampaikan hasil survei di Jakarta, Minggu (4/1). Saiful menjelaskan survei menunjukkan tingkat elektabilitas SBY paralel dengan tingkat kepuasan publik yang mengalami kenaikan menjadi 69 persen.

Hal ini berkorelasi pada pilihan responden terhadap partai politik, yaitu elektabilitas Partai Demokrat mencapai 23 persen. Menurut Saiful, publik menilai kondisi politik dan pemerintahan baik. Demikian juga penegakan hukum dan keamanan dalam keadaan baik. Kondisi ekonomi sedikit membaik, meski belum memuaskan. Kinerja di bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan adanya perbaikan. Setelah Partai Demokrat, PDIP mendapat dukungan 17,1 persen, disusul Partai Golkar 13,3 persen, PKB 4,8 persen, PKS 4 persen, Partai Gerindra 3,9 persen, PAN, 3,4 persen, PPP 3,1 persen, Partai Hanura 1,3 persen. Sedangkan 7 persen tersebar di berbagai parpol lainnya, sementara 20 persen responden menyatakan belum tahu. Saiful menilai posisi Partai Demokrat yang menempati urutan teratas merupakan kenaikan berlanjut sejak September 2008. PDIP pada survei Desember 2008 mengalami rebound menjadi 17 persen, setelah tiga bulan sebelumnya menurun hingga 14 persen. Partai Golkar pada survei Desember 2008 berada pada posisi ketiga dengan perolehan 13,3 persen, kata dia, merupakan kelanjutan penurunan dalam tiga bulan terakhir. "Dalam survei LSI posisi (Golkar) ini merupakan yang terendah dalam tiga bulan terakhir. Sedangkan posisi partai-partai lain belum mengalami kemajuan berarti," katanya. Ia menjelaskan, ada lima faktor penyebab Partai Demokrat hingga survei terakhir mengalami kenaikan dan unggul sementara atas partai-partai lain, yaitu faktor citra partai, kepemimpinan, evaluasi atas kondisi makro, evaluasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah dan kampanye lewat media. Menurut Saiful, responden menilai Partai Demokrat sebagai partai yang paling bersih dari korupsi yaitu 26 persen, naik dibandingkan hasil survei Oktober 2008 10,8 persen. Sedangkan PKS yang sebelumnya 9 persen turun menjadi 7 persen, PDIP naik dari 6

persen menjadi 8 persen, Partai Golkar naik dari 3,5 persen menjadi 5 persen. PAN dan PPP mengalami penurunan masing-masing dari 2,9 persen menjadi 2 persen dan 2,4 persen menjadi 2 persen. PKB juga naik citra positifnya sebagai partai bersih, dari 2,4 persen menjadi 3 persen. Responden menilai Partai Demokrat paling bagus programnya untuk rakyat di mana naik dari 14,6 persen pada survei Oktober menjadi 25 persen pada Desember 2008. Partai Golkar turun dari 12 persen menjadi 9 persen, PDIP naik dari 11,3 persen menjadi 13 persen, Gerindra naik dari 6,9 persen menjadi 8 persen. Sedangkan PKS, PKB, PAN, PPP, Hanura berada di bawah 5 persen. Direktur Eksekutif Lembaga Riset Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Jeffrey Giovanni menyatakan setuju dengan hasil survei LSI. "Partai Golkar memang belum beriklan. Mulai besok (Senin, 5/1) Partai Golkar akan beriklan, sehingga jika dilakukan survei Februari 2009 hasilnya tentu berubah," kata Jeffrey. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, hasil survei LSI selain merupakan cermin kepercayaan rakyat atas kemajuan yang telah dicapai selama ini, juga menunjukkan gejala yang baik dalam kehidupan demokrasi di Tanah Air. "Partai politik dan pemimpin yang bekerja keras akan diapresiasi dan dinilai positif oleh rakyat. Ini adalah perkembangan yang maju dalam demokrasi kita," ujar Anas kepada Jurnal Nasional kemarin.

Menurut Anas, kenaikan angka dukungan Partai Demokrat dan SBY tidak jatuh dari langit, tapi buah dari kerja-kerja yang diapresiasi publik selama ini. Penilaian apresiasi itu menunjukkan publik atau pemilih semakin rasional dan cerdas. Partai Demokrat, kata Anas, selama ini serius melakukan kampanye melalui iklan maupun para calon anggota legislatif yang terjun ke lapangan. Sementara Presiden SBY terus berkonsentrasi bekerja sebagai presiden untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, termasuk mengatasi dampak krisis global. "Sebagai partai, PD mulai tampak berbakat untuk menjadi juara. Peluang menjadi juara bukan hanya monopoli Golkar dan PDIP," ujar Anas. (Jurnal Nasional)

B. EKONOMI :

1. Infrastructure projects key to safeguarding economy

The government and businesses seem to have agreed on one solution that could mitigate the impact of the global slowdown while also creating millions of new jobs -- to accelerate government-led infrastructure projects. Up to Rp 100 trillion (about US\$9.95 billion) of funds have been set aside to finance projects developing ports, turnpikes, railways, bridges, water irrigation systems and others, with the government already putting out the tenders for some of these projects. Sri Mulyani Indrawati, Finance Minister who is also acting Coordinating Minister for Economy, said recently that these ongoing tenders were mostly managed by the Public Works Ministry. "I'm asking other government and regional administrative units to follow suit so that infrastructure projects can start no later than Jan. 5," Mulyani said. Bambang Susantono, a deputy to the coordinating minister for the economy, in charge of infrastructure, recently said that: "We have begun to tender projects to speed up infrastructure development in 2009. Infrastructure determines (our) competitiveness (with other countries)." Funding for infrastructure projects comes from long-term investment, which may be difficult to obtain during an economic downturn as may investors prefer quick-yielding investments.

Therefore it rests on the shoulders of government to push these projects, Bambang said. Indonesia's economy may grow by as little as 4.5 percent in 2009 due to the global economic downturn, which will hit exports and investment, a drop from the expected 6.1 percent economic growth this year. The government has said it will speed up government spending as early as January to boost the economy. In the first three quarters of 2008, the economy grew by 6.3 percent from a year earlier, according to the Central Statistics Agency (BPS). Mulyani said that Rp 24 trillion would be channeled to local administrations to strengthen their capacity to implement key infrastructure projects in the regions. "We will continue transferring infrastructure funds to regional administrations,

and they should increase the share of their budgets on activities that create more jobs," she said. In addition to the Rp 24 trillion, the government also plans to spend Rp 72 trillion on numerous infrastructure-related projects conducted by central government units in early 2009. Of the total, Rp 25.8 trillion will be spent by the Public Works Ministry, Rp 12.6 trillion by the Transportation Ministry, Rp 4.5 trillion by the Energy and Mineral Resources Ministry, Rp 3.5 trillion by the Trade Ministry, Rp 2.8 trillion by the Finance Ministry, Rp 2.2 trillion by the Religion Affairs Ministry, Rp 1.1 trillion by the Fishery and Maritime Ministry and Rp 1 trillion by the Education Ministry. M.S. Hidayat, chairman of Indonesia's Commerce and Industry Chambers (Kadin), said that infrastructure projects were one way to help compensate for possible massive layoffs in 2009 as industries cut production capacity because of weakening demand. "The Rp 100 trillion of infrastructure projects would be one way to safeguard the economy from the impact of the global crisis. Kadin welcomes this initiative and will cooperate to help make this program a success," Hidayat said.

The government has estimated that about \$65 billion will be needed in new infrastructure investment in the next three years. It estimates that next year's infrastructure projects would be able to absorb up to 1.1 million new workers. (The Jakarta Post)

C. SOSBUD

1. Gempa di Manokwari

Gempa di Manokwari, Papua Barat, Minggu (4/1), mengakibatkan seorang anak tewas, lebih dari 40 orang luka, dan ratusan bangunan rusak. Siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, ada dua korban jiwa. Gempa pertama terjadi Minggu pukul 02.43 dengan kekuatan 7,2 skala Richter. Pusat gempa berada di sebelah barat Manokwari dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa susulan terjadi pada pukul 05.33 dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Getaran gempa membuat Hotel Mutiara Sanggeng dan Hotel Kali Dingin Wosi ambruk. Empat tamu terjebak dalam Hotel Mutiara. Keempat korban dapat dievakuasi enam jam sesudahnya dalam kondisi kritis. Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Yolanda Fabiola Banggoanbo (10) tewas tertimpa bangunan. Hingga Minggu petang, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan, Manokwari diguncang 29 kali gempa tektonik berkekuatan lebih dari 5 skala Richter.

Direktur RSUD Manokwari Hengky Tewu menuturkan, ada 26 orang dirawat karena patah kaki dan tangan. Lima di antaranya penumpang kapal Dorolonda yang sedang berlabuh di dermaga Pelabuhan Manokwari, Minggu pagi. Mereka terjatuh dari tangga kapal. Menurut Kepala Polres Manokwari Ajun Komisaris Besar Pit Wahyu, berdasarkan laporan para kepala polsek, korban jiwa ada 1 orang, luka ringan 40 orang, dan luka berat 3 orang. Jumlah pengungsi sekitar 1.000 orang di kota dan 7.000 orang di Distrik Masni, 90 kilometer dari kota. Pit mencatat, Kantor Gubernur Papua Barat, kantor bupati, dan sejumlah kantor distrik rusak ringan. Sebelas bangunan rusak berat di kota (Distrik Manokwari Barat), antara lain Hotel Swiss-Bell, Mal Hadi, Gedung Pelni, rumah dinas bupati, dan gudang beras. Selain itu, 106 rumah rusak ringan dan 60 rumah rusak berat. Sebuah masjid dan dua gereja juga rusak.

Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Anthony Lessnusa mengatakan, warga butuh bahan makanan dan tenda. Warga Manokwari berjumlah 200.000 memilih tinggal di luar rumah karena takut gempa susulan. Untuk sementara, pemkab dan aparat keamanan menyediakan posko pengungsian di Lapangan Borarsi, Markas Kodim Manokwari, dan Lapangan TNI AL. Aktivitas penerbangan di Bandara Rendani Manokwari dialihkan ke Bandara Frans Kaisiepo, Biak, dan Bandara Sentani, Jayapura. Kepala Bandara Rendani Sabaruddin mengatakan, gempa menyebabkan peralatan navigasi dan komputer di menara kontrol terjatuh sehingga membutuhkan kalibrasi ulang.

Gempa juga terasa di Sorong. Sejumlah bangunan rusak, tetapi tak ada korban jiwa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu siang, menginstruksikan sejumlah menteri agar berangkat ke Manokwari.

Presiden juga berkomunikasi dengan Gubernur Papua Barat Abraham Octovianus untuk memeriksa langkah darurat yang dilakukan. "Saya menerima informasi ada empat orang meninggal akibat gempa dan beberapa bangunan rusak," katanya. Menurut siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala BNPB, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan beserta sejumlah wartawan berangkat ke lokasi bencana pukul 14.00. Dengan pesawat Hercules, tim membawa 1 mobil penyelamat, instalasi penjernih air, 20 tenda peleton, dan 200 tenda gulung. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan telah mengecek kondisi pascagempa bumi di Manokwari. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Surono menyatakan, warga tak perlu khawatir terjadi tsunami karena pusat gempa berada di darat. Gempa bumi tektonik berkekuatan 5,6 skala Richter juga melanda Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, Minggu pukul 02.20. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. (Kompas)

2. TNI AL Siagakan Kapal RS untuk Manokwari

Mabes TNI Angkatan Laut (AL) menyiagakan Kapal Rumah Sakit (RS) KRI dr Soeharso untuk membantu penanganan korban gempa bumi di Manokwari, Papua Barat. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijanto usai memimpin upacara HUT ke-46 Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) di Jakarta, Senin (5/1), mengatakan pihaknya juga telah menyiagakan beberapa kapal perang untuk membantu penanganan korban bencana gempa bumi berskala 7,6 skala Richter (SR) tersebut. "Beberapa KRI yang ada di sekitar Papua seperti di Sorong, Selatan Papua, Ambon, dan sebagainya kita gerakkan kesana untuk memberikan bantuan secukupnya kalau dibutuhkan. Saat ini dilaporkan ada empat KRI yang berada di sekitar Papua," ujarnya.

Jadi, jika memang dibutuhkan beberapa KRI termasuk kapal rumah sakit yang berada di Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya, tambah Tedjo, kapal-kapal itu siap digerakkan. Gempa di Manokwari pada Minggu (4/1) mengakibatkan seorang anak tewas, lebih dari 40 orang luka, dan ratusan bangunan rusak. Siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, ada dua korban jiwa.

Gempa pertama terjadi Minggu pukul 02.43 WIT dengan kekuatan 7,2 SR. Pusat gempa berada di sebelah barat Manokwari dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa susulan terjadi pada pukul 05.33 dengan kekuatan 7,6 SR. Getaran gempa membuat Hotel Mutiara Sanggeng dan Hotel Kali Dingin Wosi ambruk. Empat tamu terjebak dalam Hotel Mutiara. Keempat korban dapat dievakuasi enam jam sesudahnya dalam kondisi kritis. Di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Yolanda Fabiola Banggoanbo, 10, tewas tertimpa bangunan. Hingga Minggu petang, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan, Manokwari diguncang 29 kali gempa tektonik berkekuatan lebih dari 5 SR.

Direktur RSUD Manokwari Hengky Tewu menuturkan, ada 26 orang dirawat karena patah kaki dan tangan. Lima di antaranya penumpang kapal Dorolonda yang sedang merapat di dermaga Pelabuhan Manokwari, Minggu pagi. Mereka terjatuh dari tangga kapal. Menurut Kepala Polres Manokwari Ajun Komisaris Besar Pit Wahyu, berdasarkan laporan para kepala polsek, korban jiwa ada satu orang, luka ringan 40 orang, dan luka berat tiga orang. Jumlah pengungsi sekitar 1.000 orang di kota dan 7.000 orang di Distrik Masni, 90 kilometer dari kota. Pit mencatat, Kantor Gubernur Papua Barat, kantor bupati, dan sejumlah kantor distrik rusak ringan. Sebelas bangunan rusak berat di kota (Distrik Manokwari Barat), antara lain Hotel Swiss-Bell, Mal Hadi, Gedung Pelni, rumah dinas bupati, dan gudang beras. Selain itu, 106 rumah rusak ringan dan 60 rumah rusak berat. Sebuah masjid dan dua gereja juga rusak. (Media Indonesia)

D. HANKAM :

1. TNI Awasi Ketat Dua Pulau di Bengkulu

Dua pulau terpencil di perbatasan perairan antarnegara di Provinsi Bengkulu yakni Pulau Enggano dan Pulau Mega, harus diawasi ketat karena rawan menjadi lokasi kejahatan internasional. Komandan Pangkalan TNI-AL (Lanal) Bengkulu Letkol Laut (P) Choky Hutabarat, Senin (5/1), mengatakan kedua pulau itu sekarang menjadi target pengamanan khusus oleh TNI-AL dan pemerintah daerah Bengkulu karena berada di perbatasan perairan antarnegara.

Selain dua pulau itu, ada beberapa pulau kecil lainnya di perairan Bengkulu menjadi sasaran pengamanan laut. Pulau di perairan Bengkulu saat ini ada sekitar sepuluh buah termasuk Pulau Enggano dan Mega di perbatasan perairan Sumatera Barat dan pula-pulau kecil lainnya. Terkait dengan adanya belasan pulau kecil yang belum punya nama di perairan Bengkulu, pihaknya mengaku bingung karena tidak terdapat dalam peta pengamanan laut di wilayah Barat Bengkulu. "Saya sangat bingung dengan adanya belasan pulau yang belum punya namadi perairan Bengkulu," katanya. Ia menjelaskan, secara internasional diakui bahwa di Provinsi Bengkulu hanya ada dua pulau. Kedua pulau itu yaitu Pulau Enggano dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas sekitar 402 km2, memiliki enam desa dan satu kecamatan yang dihuni oleh 2.346 orang jaraknya sekitar 90 mil dari Kota Bengkulu.

Pulau kedua yaitu Pulau Mega yang berada di perbatasan dengan perairan Sumatra Barat dengan luas sekitar 5,7 km2 namun tidak berpenghuni dan jaraknya dari pantai barat Bengkulu sekitar 80 mil. Ia mengkhawatirkan pulau-pulau kecil lainnya, baik yang sudah punya nama maupun yang belum akan menjadi sebuah tumbuhan karang yang saat pasang turun muncul ke permukaan, tapi setelah pasang naik akan hilang, namun demikian pihaknya juga akan meneliti pulau-pulau tersebut. Komandan Korem 041 Garuda Emas (Gamas) Bengkulu Kol Inf Tarwin secara terpisah mengatakan, pihaknya sudah menempatkan personil TNI di pulau terluar di Bengkulu khususnya di Enggano. Penempatan personil TNI-AD itu tergabung pada Koramil setempat, sebelumnya hanya ada sekitar 20 personil, sekarang ditambah menjadi 35 personel TNI-AD dan dibantu personil TNI-AL yang sudah lama bertugas di pulau itu.

Sementara itu, Pulau Mega secara rutin diawasi bersama TNI-AL dan sekarang ini belum ditempatkan personil TNI-AD, karena sampai sekarang pulau yang luas 5,7 KM2 belum berpenghuni, namun sering dimanfaatkan nelayan sebagai persinggahan, katanya. (Media Indonesia)

E. HUKUM :

1. Kejaksaan diklaim memiliki 52 rekening liar

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tahun 2008 menyebutkan ada 14 rekening titipan kerugian negara yang tidak terdaftar dan 38 rekening yang tidak didukung oleh sistem administrasi yang lengkap di lingkungan Kejaksaan Agung. Indonesia Corruption Watch menilai sejumlah rekening tersebut dapat dikategorikan sebagai rekening liar. "Seharusnya jika ada uang pengganti kerugian negara yang disetorkan ke Kejaksaan Agung, langsung disetorkan ke kas negara saat itu juga. Yang terjadi malah, uang tersebut diputar-putar dulu, baru diserahkan atau malah menguap entah kemana, seperti yang terjadi pada aset Hendra Rahardja," kata Peneliti Hukum Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Minggu (4/1).

Febri menuturkan ketiadaan tenggat waktu untuk menyerahkan setoran tersebut ke kas negara bisa menjadi celah penguluran waktu penyerahan. Seharusnya, menurut Febri, ada penentuan waktu yang tegas terkait hal ini. Kejelasan waktu juga, lanjut Febri, dapat menghindarkan kecurigaan masyarakat tentang adanya usaha korupsi dari dana hasil korupsi. Dengan demikian, uang negara yang terselamatkan menjadi jelas keberadaannya. Selain itu pula, kejelasan proses pengembalian uang dari Kejagung ke dalam kas negara harus lebih dipertegas. Febri malah menyarankan perlunya audit investigatif oleh BPK untuk menangani kesimpangsiuran data. "Tidak ada info berapa yang berhasil diselamatkan dengan jelas. Kejaksaan kemarin mengklaim berhasil menyelamatkan Rp80 triliun dan US\$18 juta pada 2005-2008.

Tapi, laporan BPK menyebutkan hanya Rp382 miliar dan masih ada Rp7,72 triliun yang belum disetor Kejagung," sambung Febri. Febri menyatakan jika besaran uang yang diklaim tersebut juga termasuk pengembalian kepada pihak ketiga, hal tersebut merupakan hal yang berbeda. Menurutnya, pengembalian kepada pihak ketiga tidak bisa dimasukkan ke dalam kerugian negara yang bisa diselamatkan. Padahal, arti kerugian negara adalah uang yang harus masuk ke dalam kas negara. "Salah besar kalau audit BPK itu dilakukan secara sampling.

Audit dilakukan secara keseluruhan dan hasil audit kejaksaan dinyatakan disclaimer. Tujuan klaim itu hanya untuk membuat ketimpangan dengan KPK," ujarnya. Terkait hal itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendi menolak memberi tanggapan. Ia beralasan ia belum mengetahui pokok permasalahannya. "Saya tidak bisaanggapi karena tidak tahu masalahnya," jawabnya. (Media Indonesia)

F. OLAH RAGA :

1. The Reds Puji Merah Putih

Timnas Oman tidak mau meremehkan Indonesia. Rapor tim Merah Putih di Piala Asia 2007 menjadi referensi khusus tim berjudul The Reds tersebut. Oman akan memulai perburuan angka di Grup B Kualifikasi Piala Asia 2011 saat menjamu Indonesia, Senin (19/1). Persiapan serius dilakukan The Reds. Oman Football Association menunjuk pelatih asal Prancis Claude Le Roy sebagai suksesor Pelatih Milan Machala. Mereka juga melakukan pertandingan uji coba kontra Senegal yang berakhir 1-0 pada 22 Desember 2008.

Tim berperingkat FIFA 96 tersebut melakukan pemanasan di Piala Teluk yang mulai digelar Minggu (4/1). Asisten Pelatih Timnas Oman Hamad Khalifa Hamed Al-Azani mengatakan, Indonesia tetap berpotensi menjadi kerikil tajam. "Jangan remehkan Indonesia. Performa mereka menjanjikan pada Piala Asia lalu. Kami tahu, komposisi mereka tidak banyak mengalami perubahan. Indonesia bisa saja menyulitkan kami, selain

Kuwait yang menjadi rival abadi Oman,"ujar Al-Azani,seperti dikutip the-afc. Tim Merah Putih finis di urutan ketiga Grup D Piala Asia 2007. Ponaryo Astaman dkk menang 2-1 atas Bahrain,tapi takluk 1-2 dari Arab Saudi dan dibungkam Korea Selatan dengan skor 1-0.Rapor dua pertemuan terakhir pun berimbang dengan masing-masing satu kali menang dan kalah. The Reds pernah menaklukkan tim Merah Putihdengan skor 3-0 pada Pra-Olimpiade 2008 dan akhirnya dibalas 1-2.

Al-Azani mengaku Grup B sebagai neraka lantaran dihuni Australia. "Grup B paling keras di antara grup lainnya.Di sana bercokol Australia,selain Indonesia dan Kuwait.Siapa pun pasti tahu materi Australia. Kualitas pemain mereka di atas rata-rata.Pemain Australia banyak tersebar di klub-klub Eropa sehingga kaya pengalaman. Kami harus bekerja keras bila ingin lolos ke final round,"lanjutnya. Opini Al-Azani dikuatkan Pelatih Oman Le Roy.Menurutnya, Oman takkan mudah melewati fase kualifikasi.Namun, The Redssiap memperebutkan satu tiket ke Doha,Qatar. "Tidak ada yang mudah.Tim dituntut konsentrasi penuh. Hasil di Piala Teluk bisa menjadi parameter kesiapan tim.Kematangan pemain akan terlihat. Kami dituntut bekerja keras.Tim siap merealisasikan target yang dibebankan federasi,"paparnya,seperti dikutip omantribune. Namun,pekerjaan mantan Pelatih Ghana itu menyiapkan tim relatif ringan.Le Roy hanya meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan Machala."Semua terlihat lancar.

Federasi mendukung program kami. Kerangka tim ini sudah terbentuk sejak awal. Machala berhasil mengumpulkan pemainpemain potensial. Harus diakui, peran Al-Azani dan Cesar Ribas juga besar dalam mematangkan pemain,"tandasnya. (Seputar Indonesia)

G. LINGKUNGAN HIDUP : Tidak Ada

III. ARTIKEL :

1. Analisis Ekonomi-Meredam Dampak Krisis dari Daerah Oleh Bambang PS Brodjonegoro, Guru Besar dan Dekan FEUI

Dampak terberat krisis finansial global sudah di ambang mata dan perekonomian Indonesia harus menghadapi salah satu ujian terberat pada tahun 2009. Segala upaya dari sisi moneter dan fiskal nasional sudah mulai dikerahkan untuk meminimalkan dampak krisis terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. APBN 2009, bersama konsumsi masyarakat, bahkan sangat diharapkan sebagai sumber pertumbuhan 2009 sehingga keberhasilan pelaksanaan APBN itu akan menjadi taruhan yang amat besar bagi pemerintah dan perekonomian Indonesia yang akan sangat sulit mengharapkan ekspor dan investasi.

Dalam sistem pemerintahan dan perekonomian Indonesia yang sudah terdesentralisasi, segala upaya pemerintah pusat melalui kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil tidak akan banyak artinya kalau tidak disertai dengan upaya yang sama kerasnya dan seriusnya dari pemerintah daerah. Dengan sistem saat ini serta mengacu pada ketentuan yang berlaku, praktis sebagian besar kewenangan pemerintahan sudah berada di tangan pemerintah daerah. Ketika perekonomian terancam krisis atau pelambatan seperti diperkirakan akan terjadi 2009, masyarakat daerah yang sudah memilih kepala daerahnya secara langsung sangat berharap kepala daerah beserta DPRD akan memperjuangkan kesejahteraan mereka. Masyarakat daerah akan makin kurang peduli mengenai besaran APBD, PAD, ataupun transfer dari pusat, tetapi lebih peduli pada bagaimana pola belanja APBD tersebut, program maupun proyek yang dibuat pemerintah daerah, serta kebijakan pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Dari segi hubungan keuangan pusat dan daerah, banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat fiskal nasional dan menciptakan stimulus pertumbuhan dari APBD mereka sendiri. Hal dasar yang harus dilakukan pemda adalah mempercepat pencairan anggaran dengan pengesahan APBD 2009 sebelum 1 Januari 2009. Pemerintah pusat dan daerah juga harus intensif mengadakan konsultasi

dengan penegak hukum agar tercapai kesepakatan dan kesepahaman atas pelaksanaan good governance di daerah. Perencanaan program dan proyek di daerah juga perlu terus diperbaiki, bersamaan dengan perbaikan kualitas aparat pemda, sehingga keterlambatan penyerapan dana alokasi khusus (DAK), seperti sudah terjadi beberapa tahun terakhir, dapat diminimalkan pada tahun 2009. Cukup besarnya surplus APBD di sejumlah daerah di Indonesia dua tahun terakhir juga memberikan peluang kepada daerah untuk ikut mendukung upaya pemerintah pusat dalam menutupi defisit APBN.

Sangat ironis bahwa pemerintah pusat telah bersusah payah mencari sumber penambal defisit APBN dengan mengandalkan surat utang negara, sementara pemerintah daerah mencatat surplus APBD total di tahun 2007 sekitar Rp 40 triliun. Gambaran ironis itu dapat dihilangkan apabila daerah-daerah surplus tersebut mau membelanjakan surplusnya untuk membeli surat utang negara. Yang tentunya tidak boleh dilupakan adalah pola belanja APBD sendiri yang diharapkan mempunyai nuansa anggaran pemerintah untuk penanganan krisis. Nuansa tersebut membawa konsekuensi harus adanya upaya penghematan, seperti pada belanja barang dan biaya perjalanan, serta pada prioritas pengeluaran yang berfokus pada upaya pengurangan kemiskinan serta perbaikan kualitas layanan dasar masyarakat.

Sesuai karakter lokal

Dalam era desentralisasi ini, pemda dituntut berlomba-lomba membuat kebijakan penanggulangan dampak krisis yang bersifat unik sesuai karakteristik lokal atau daerah bersangkutan. Selain mendukung dan memperlancar program pemerintah pusat dalam mengurangi kemiskinan, seperti bantuan langsung tunai dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, daerah diharapkan dapat menyertai program itu dengan program lokal yang lebih mengena bagi kelompok masyarakat yang rawan terkena dampak krisis. Kebijakan dasar yang harus dilakukan adalah menghapus segala macam hambatan ataupun pungutan yang tidak perlu terhadap pelaku usaha lokal.

Kebijakan penting lain adalah memfokuskan pengeluaran APBD, termasuk dari DAK, untuk terus memperbaiki kualitas layanan dasar sehingga makin mendekati standar pelayanan minimal nasional dan tak membebani pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah harus secara serius ikut mengurangi kemungkinan laju inflasinya sekaligus bersama-sama secara nasional mengupayakan laju inflasi nasional lebih rendah dari 6 persen. Memastikan kelancaran pasokan berbagai bahan pokok serta penyederhanaan rantai perdagangan bahan pokok itu sendiri adalah sebagian langkah yang bisa diambil pemda dalam ikut mengurangi laju inflasi.

Daerah juga diharapkan ikut menjaga pertumbuhan ekonominya. Dalam perekonomian yang makin terdesentralisasi, pertumbuhan ekonomi nasional adalah akumulasi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dibutuhkan sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi khususnya di masa krisis. Pelaksanaan investasi publik akan menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan di atas 5 persen pada tahun 2009 sehingga proyek-proyek besar harus segera dilaksanakan dan terasakan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja. Pemerintah pusat tentu akan fokus pada unsur regulasi dan pencarian pendanaan ataupun investor strategis, sedangkan pemda dapat mendukung dalam bentuk kecepatan pembebasan lahan atau partisipasi pendanaan dari pemda sendiri maupun kalangan pengusaha daerah.

Untuk menyelamatkan beberapa komoditas perkebunan dan sektor manufaktur, pusat dan daerah harus berupaya bersama dalam program penciptaan nilai tambah, di mana krisis saat ini dapat menjadi momentum perlunya pengembangan industri turunan dari berbagai komoditas perkebunan serta mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor komoditas dengan nilai tambah minimal. Daerah dapat merespons dalam bentuk pengembangan strategi industri lokal serta mendayagunakan kemungkinan kerja sama ekonomi antardaerah. Gubernur dapat menjadi inisiator kerja

sama ekonomi antara kabupaten dan kota di provinsinya sehingga tercipta perekonomian yang terintegrasi dan berskala ekonomi yang memadai untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (Kompas)

2. Mumpung Masih Tahun Baru Oleh Prof Dr Haryono Suyono

Hari ini, liburan panjang tahun-tahun baru, Tahun Baru Hijriah dan Tahun Baru Masehi, telah berakhir. Liburan panjang, yang bagi sebagian orang merupakan kesempatan untuk silaturahmi dengan keluarga yang tempat tinggalnya jauh, terpaksa diakhiri. Bagi sebagian, berakhirnya masa liburan memberi harapan baru bahwa barang dagangannya, usaha rumah makannya, atau kegiatan ekonomi lainnya, bakal mulai marak. Bagi sebagian, rezeki liburan di desa, yang menjadi ramai karena keluarga kota berkunjung ke desa, kembali sepi. Perubahan keramaian usaha itu merupakan harapan dan tantangan yang menarik di tahun politik ini. Kita harus mulai bekerja keras dan tidak boleh beranggapan bahwa hari-hari ini masih liburan tahun baru. Sebagian besar penduduk yang bekerja akan kembali bekerja. Hari pertama barangkali masih diisi saling salam berbagi kebahagiaan atau kekecewaan karena pengalaman menarik yang tidak terlupakan selama masa liburan panjang.

Ada beberapa hal yang berbeda dan menarik pada pengujung tahun lalu. Hampir di seluruh pelosok negeri, partai-partai politik dan perseorangan yang mencalonkan diri untuk Pemilu 2009 berlomba berbaik hati. Di mana-mana terlihat ucapan selamat tahun baru yang marak. Seakan semua partai politik dan perseorangan berubah menjadi organisasi dan individu yang sangat ramah dan baik hati.

Bendera dan umbul-umbul yang masih berbau tinta dan cat mencorong berkibar marak di mana-mana. Keluarga kurang mampu, yang dipandang mempunyai anak dewasa yang bisa menjadi pemilih, mendadak-seperti menjelang Lebaran-memperoleh sumbangan "sembako" tanda kasih dari partai politik atau perseorangan yang sebelumnya tidak pernah peduli.

Akhir tahun seperti ini mengguncang hati nurani bangsa yang luar biasa. Keluarga miskin menjadi "sangat bahagia dan bersyukur" karena memperoleh rezeki nomplok tanpa harus bekerja keras. Praktik seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlalu mengubah budaya bangsa. Alangkah indahnya kalau para calon dan partai politik itu tidak memanjakan anak bangsa dengan pemberian yang seakan menyelesaikan masalah. Ada baiknya partai politik dan perseorangan itu bekerja keras secara sistematis mengembangkan program pemberdayaan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan mengusahakan penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi keluarga miskin muda dan remaja putus sekolah.

Partai-partai politik dan para calon anggota legislatif, atau calon eksekutif seperti calon wali kota dan bupati, berebut membentuk dan mengembangkan pos-pos pemberdayaan keluarga atau posdaya di pedesaan. Pos-pos itu dilengkapi program pelatihan keterampilan, penyediaan modal kerja, serta lapangan kerja baru agar keluarga miskin habis terserap dalam gegap gempita lapangan kerja baru yang disediakan tersebut.

Umbul-umbul partai tidak menjadi hiasan mati yang akan kumal dimakan hujan, tetapi hidup subur di hati rakyat karena sanggup menghidupi keluarga miskin dan mengubah tangan yang menadah ke atas meminta-minta menjadi tangan yang mengepal pasti untuk mendukung jagonya yang baik hati. Hidup warga miskin pada tahun yang masih baru ini akan lebih bahagia dan sejahtera. Dengan tatapan yang pasti dan tulus ikhlas, anggota keluarga dewasa pada waktunya pasti mencoblos partai politik atau perseorangan yang telah mengangkat martabatnya sebagai "jagonya" dalam pemilu nanti.

Penempatan setiap jago atau calon jago untuk mendapatkan jumlah suara tertentu dalam suatu daerah pemilihan (dapil) sebenarnya merupakan kesempatan emas untuk membagi para calon pada tugas kemanusiaan yang adil sehingga semua keluarga miskin di dapilnya dapat diantarkan bukan dengan janji kosong, melainkan dengan upaya nyata. Upaya itu bisa dimulai pada saat kampanye dan dilanjutkan pada saat jago yang bersangkutan memegang jabatannya nanti. Pada saat menjabat, pendapatan yang diraihinya sebagian dibagi untuk melanjutkan usaha di dapilnya. Dengan demikian, pada pemilihan berikutnya, seorang jago yang baik bisa diukur tidak saja dari tingkah lakunya di DPR, atau dalam jabatannya, tetapi utamanya dalam membantu keluarga di dapilnya.

Mumpung masih tahun baru, mumpung partai-partai politik dan perseorangan masih ada waktu tiga bulan untuk kampanye, marilah kita isi kampanye pemilu dengan langkah-langkah nyata untuk mengentaskan kemiskinan. Marilah kita hilangkan kebodohan melalui program pemberantasan buta aksara. Marilah kita membantu meningkatkan akses setiap keluarga kurang mampu pada pelayanan kesehatan yang bermutu. Sekaligus kita memberi mereka pelajaran untuk menerima pola hidup sehat di sekitar rumah tangganya, sehingga halamannya bersih, bebas jentik nyamuk, bebas air tergenang, dan kotoran lain yang bisa menjadi sarang penyakit. Marilah kita bantu mereka menjadikan halaman rumahnya sebagai kebun bergizi sehingga seluruh keluarga hidupnya teratur dan mempunyai bahan makanan bergizi yang berasal dari kebunnya.

Marilah kita sediakan bidan atau kita bantu keperluan bidan di pedesaan agar bisa mendampingi rakyat, utamanya keluarga kurang mampu di pedesaan, membangun hidup sehat dan sejahtera. Marilah kita tabung uang kita di pedesaan melalui lembaga keuangan pedesaan, atau koperasi, agar lembaga itu bisa menyediakan dana yang cukup di pedesaan. Dengan penyediaan dana yang cukup itu dengan mudah, bisa membantu keluarga kurang mampu bekerja sama dengan keluarga mampu membangun usaha ekonomi gotong royong. Kalau perlu, marilah kita membantu memberi subsidi bunga, atau menjadi pendamping kolateral agar penduduk desa bisa mengakses modal dengan baik dan menjadi pengusaha-pengusaha yang menggali potensi di desanya.

Mumpung masih tahun baru, marilah kita pikirkan-bukan bagaimana menjadi wakil rakyat nanti-sekarang juga bagaimana kita mendampingi rakyat membangun keluarga yang cerdas dan terampil, keluarga yang bekerja keras, keluarga yang berketeguhan, dan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Marilah kita bersatu untuk maju, mumpung masih tahun baru. (Suara Karya)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. **Where will the poor go this year?**

"RI's richest poorer by end 2008: Forbes" read this daily's headline a short while ago. This immediately raises the question: Now that even the richest have become poorer, how will Indonesia's poor fare? As the Chinese are fond of saying, we are now living in interesting times. Free market economics without quality of governance has brought the world economy to desperate straits. Untrammelled greed and little supervisory zeal to temper the "irrational exuberance" has seen the downfall of 20th century capitalism, leaving humankind facing a global recession. When we went through something similar a decade ago, the number of poor households exploded. Decades of progress in creating pathways out of poverty, albeit under an authoritarian regime, were swept away by similar greed and complacency. The medicine prescribed by the IMF with the World Bank's blessing, i.e., bailing out the big players, allowed the culprits to emerge stronger.

The poor got the short shrift. Although agriculture had generated around 5 million new jobs between August 1997 and August 1998, the state budget was directed away from agricultural investment. Rural infrastructure was allowed to deteriorate and irrigation works fell into disrepair, while health and education services slipped further away from the grasp of poor families. The IMF/WB/GOI Letter of Intent drove the last nail into the farm laborer's coffin by facilitating the dumping of agricultural commodities by the developed countries. If the number of poor had been reported to be 22.5 million in 1996, with the new BPS (Central Statistics Agency) definition in 1998 it had more than doubled to 49.5 million. A decade later, despite the billions spent on all sorts of poverty-alleviation programs, even the most ardent supporters of the regime have conceded that the number of poor households has continued to rise.

Why the persistent poverty among such rich natural resources? It behooves us to try and understand the dynamics of poverty and prosperity in a real-life setting: How did the richest Indonesians manage to become so rich, and why have the poor Indonesians remained so poor? The enigma of rich natural resources and poor people is normally explained by poor development policies, improper sequencing, the inferior quality of institutions and poor governance. As is evident on Java, Sumatra, Kalimantan and Papua, different migrant groups have invariably fared better than the indigenous. Why couldn't the others embark on the same path?

A fair treatment of this subject merits a doctoral dissertation, but on the whole the poor remain poor because they are marginalized and silenced; they are most often those who live in remote rural areas, are ethnic minorities or members of excluded groups, with lower education, fewer assets and less access to markets. The prevalence of self-serving officials at all levels has enabled extractive institutions to keep re-inventing themselves -- such as the banks that are channeling the savings of poor farm laborers into the coffers of domestic conglomerates. Such poverty traps manifest themselves most strikingly in two of our frontier regions -- Aceh and Papua. Despite the fact that both regions have been granted special autonomy and are awash in funds, poverty still appears to be intractable. Indeed, poverty has always had rural origins, and even today, in Aceh, rural poverty is twice as high as urban poverty, while in Papua, 94 percent of the poor are rural. It is due to precisely such poverty traps that the special autonomy dividend is yet to be shared by the populace in these two regions.

These self-same poverty traps, exacerbated by poor governance across the legislative, executive and judicial branches, have generated great inequities. A cursory glance at the track record of our richest fellow citizens fails to reveal any well-conceived and perfectly implemented brilliant strategies. Neither do any outstanding technologies, innovations or breakthroughs make themselves evident. There is no denying that some had inherited fortunes from their forbears who had toiled endlessly and consequently bequeathed empires to their heirs. However, if one were to introduce values into the equation, roughly a third of our rich have been thriving on the smoking addiction of poor Indonesians, another third have capitalized upon the cheap land and money pushed upon them by corrupt officials and sleazy bankers to build agribusinesses, whilst the remaining had well-wishers very high up in President Soeharto's government handing out monopolies and lucrative government contracts. Of even greater importance has been the belief that wealth will trickle down to the poor. The two crises a decade apart have proven the failure of the unfettered market, when no one looks after the broader public interest. At the height of the boom, former U.S. Labor Secretary, Robert B. Reich, had warned that

although investment values had gone through the roof, "the institutions that used to aggregate citizen values have declined".

One needs to bear in mind that crises have long been considered as part and parcel of capitalism. Joseph A. Schumpeter argued that crises were instrumental in "creative destruction" necessary for the survival of capitalism, based on the belief that civilization only progresses when old methods of production (and consumption) are destroyed and replaced by better methods. We are now witnessing excess and hubris work through a cycle of boom and bust to humble even the best and brightest. What we need, therefore, are new forms of democratization and governance to ensure that market transactions lead to outcomes that are socially desirable -- that involve a more sustainable use of natural resources; that lead to a more equitable distribution of wealth and power and that promote patterns of consumption more in line with a carrying capacity of a world which we global citizens want our children to inherit.

This calls for a paradigmatic shift to something known as "People-Driven Development". Herein, all policies formulated, institutions designed and technologies developed or transferred-in would be driven by the needs and capacities of the people. Identification of these needs and capacities demands an equal-discourse with the poor themselves. With proper sequencing, by starting with conception-control, working towards adequate food and nutrition, providing health services that reach out and are affordable, then designing education that addresses local needs, one reaches the final stage of infrastructure and institutions to create seamless economies. The poor, then, would be able to climb up such a ladder out of poverty unaided. (The Jakarta Post)

Jakarta, 5 Januari 2009
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu